



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

PERATURAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR 64 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

TAHUN 2023-2027

WALI KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keberlangsungan pelayanan Pemerintah Daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Kota Madiun dan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kota Madiun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2023-2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2022;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.
10. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 63 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN TAHUN 2023-2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Madiun.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
7. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Perangkat Daerah penyelenggara urusan bidang keuangan pada sub urusan pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
8. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Perangkat Daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan Daerah.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
10. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi Kebutuhan Dasar Warga Negara.
11. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
12. Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

13. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu Program.
14. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan atau program dalam bentuk keluaran atau hasil.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
20. Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah gabungan dari beberapa Perangkat Daerah yang bertugas merumuskan pemenuhan kebutuhan, jenis dan mutu layanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

BAB II

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN SPM

Pasal 2

Rencana Aksi Daerah penerapan SPM di lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2023-2027 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dan langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2027.

Pasal 3

- (1) Rencana Aksi Daerah penerapan SPM bertujuan untuk memenuhi pencapaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- (2) Target dan capaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk kurun waktu target dan capaian jangka menengah dan jangka pendek.

Pasal 4

- (1) Target dan capaian jangka menengah terintegrasi dengan RPJMD dan diakomodir pada rencana strategis PD.
- (2) Target dan capaian jangka pendek terintegrasi dengan RKPD dan Renja PD.

BAB III

PENYUSUNAN DOKUMEN

Pasal 5

Penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah penerapan SPM di lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2023-2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melibatkan PD terkait yakni:

- a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Inspektorat; dan
- d. PD yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar.

Pasal 6

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a memastikan Program, Kegiatan, dan subkegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar terintegrasi ke dalam dokumen RKPD dan Renja PD.

Pasal 7

Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b memastikan Program, Kegiatan, dan subkegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam dokumen RKPD dan Renja PD terintegrasi ke dalam APBD dan memastikan tercatat sampai kedalam dokumen pelaksanaan anggaran PD yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar.

Pasal 8

Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mengoordinasikan pengawasan penerapan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM.

Pasal 9

PD yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 10

- (1) Dokumen Rencana Aksi Daerah penerapan SPM di lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2023-2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM;
 - c. BAB III : Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM;
 - d. BAB IV : Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan SPM; dan
 - e. BAB V : Kesimpulan dan Saran.
- (2) Dokumen Rencana Aksi Daerah penerapan SPM di lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2023-2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Penerapan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap triwulan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan Penerapan SPM tahun berikutnya.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah penerapan SPM di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dibebankan pada APBD dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 15 Desember 2023

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 15 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2023 NOMOR 64/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

**RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN TAHUN 2023-2027**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Daerah, secara garis besar telah dibagi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat hingga Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan tersebut terdiri atas urusan pemerintahan absolut yang menjadi kewenangan penuh Pemerintah Pusat, urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, serta urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Pada pasal 11 ayat (3) menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Selanjutnya pada pasal 18 menyebutkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan pengaturan melalui peraturan pemerintah.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Terdapat 6 urusan pemerintahan wajib yang menjadi fokus pada pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Pekerjaan Umum, 4) Perumahan Rakyat, 5) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta 6) Sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal tersebut dengan berpedoman pada aturan yang ditetapkan oleh kementerian teknis pengampu urusan. Dalam penerapan SPM sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Percepatan penerapan dan pencapaian SPM dilatarbelakangi karena penerapan pencapaian SPM belum optimal. Penerapan dan pencapaian SPM masih banyak menghadapi kendala yaitu masih terbatasnya pemahaman Pemerintah Daerah dalam menghitung target indikator SPM, belum disusunnya rencana pencapaian SPM beserta penganggarannya.

Dalam rangka perwujudan percepatan dan pencapaian SPM di daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dimana pada Pasal 21 ayat (2) menyebutkan bahwa Tim Penerapan SPM daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas diantaranya mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati/wali kota.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah untuk menjadi acuan bagi Perangkat Daerah pengampu SPM dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Tujuan dari penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah sebagai berikut:

1. Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Madiun;
2. Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran;

3. Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM; dan
4. Menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.

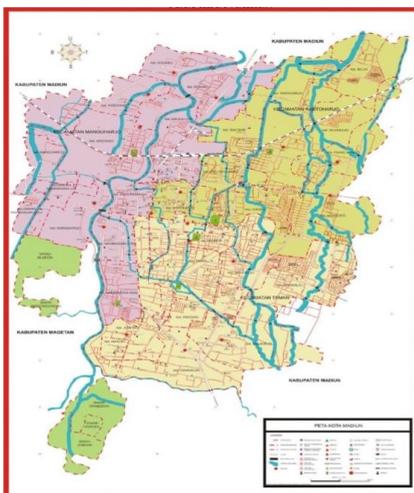
C. KONDISI UMUM WILAYAH

1. LUAS WILAYAH DAN BATAS WILAYAH

Secara geografis, Kota Madiun memiliki luas wilayah seluas 33,23 km². Kecamatan Taman dengan luas wilayah sebesar 12,46 km² (37,50%), disusul Kecamatan Kartoharjo seluas 10,73 km² (32,29%), dan Kecamatan Manguharjo seluas 10,04 km² (30,21%). Kota Madiun terletak pada koordinat 111⁰ BT – 112⁰ BT dan 7⁰ LS – 8⁰ LS. Kota Madiun hampir berbatasan sepenuhnya dengan Kabupaten Madiun, serta Kabupaten Magetan di sebelah Barat. Kota Madiun memiliki sungai yang merupakan salah satu anak sungai Bengawan Solo. Secara topografi, wilayah Kota Madiun berada pada dataran rendah dengan ketinggian rata-rata kurang lebih 63 meter hingga 67 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Madiun meliputi :

- Sebelah utara : Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun;
- Sebelah selatan : Kecamatan Geger Kabupaten Madiun;
- Sebelah timur : Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun;
- Sebelah barat : Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kota Madiun



Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Secara administratif, Kota Madiun terbagi menjadi 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Manguharjo terdiri dari 9 kelurahan, Kecamatan Taman terdiri dari 9 kelurahan, dan Kecamatan Kartoharjo terdiri dari 9 kelurahan. Berikut ditampilkan jumlah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) ditiap kecamatan di Kota Madiun, yaitu:

- Kecamatan Manguharjo terdiri dari 325 RT dan 88 RW;
- Kecamatan Taman terdiri dari 396 RT dan 107 RW; dan
- Kecamatan Kartoharjo terdiri dari 309 RT dan 74 RW.

Secara rinci untuk luas wilayah dan jumlah RT, RW di Kelurahan dan Kecamatan se Kota Madiun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kota Madiun

No.	Kecamatan / Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah	
			RW	RT
I.	Manguharjo	10,04	88	325
1.	Manguharjo	1,40	8	36
2.	Sogaten	1,12	9	29
3.	Patihan	0,84	6	22
4.	Ngegong	1,34	5	17
5.	Winongo	2,00	11	37
6.	Madiun Lor	0,73	9	41
7.	Pangongangan	0,61	9	26
8.	Nambangan Lor	0,98	16	71
9.	Nambangan Kidul	1,02	15	46
II.	Taman	12,46	107	396
1.	Mojorejo	1,54	14	64
2.	Pandean	0,32	18	60
3.	Banjarejo	1,92	9	35
4.	Kuncen	1,83	4	9
5.	Manisrejo	0,92	12	60
6.	Kejuron	1,59	15	50
7.	Josenan	1,06	9	31
8.	Demangan	1,26	11	36
9.	Taman	2,02	15	51
III.	Kartoharjo	10,73	74	309
1.	Kartoharjo	0,94	9	38
2.	Oro-Oro Ombo	0,81	9	43
3.	Klegen	0,84	10	48
4.	Kanigoro	1,62	12	52
5.	Pilangbango	1,21	5	22
6.	Rejomulyo	2,03	11	38
7.	Sukosari	0,55	6	18
8.	Tawangrejo	1,77	6	24
9.	Kelun	0,96	6	26
Jumlah		33,23	269	1.030

Sumber: Buku Kecamatan Dalam Angka 2022

2. DEMOGRAFI

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, jumlah penduduk Kota Madiun tahun 2022 adalah sebanyak 201.760 jiwa. Rasio jenis kelamin tercatat jumlah penduduk laki-laki di Kota Madiun sebanyak 98.944 orang, atau 49,04 persen dari penduduk Kota Madiun. Sementara, jumlah penduduk perempuan sebanyak 102.816 orang, atau 50,96 persen dari penduduk Kota Madiun. Sedangkan jumlah Kepala Keluarga di Kota Madiun sebanyak 72.717 KK tersebar di tiga wilayah kecamatan dengan berbagai tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan.

Pada tahun 2022 pertumbuhan penduduk di Kota Madiun sebesar 0,15% dari tahun sebelumnya dengan persebaran yang cenderung merata pada setiap kecamatan. Jumlah penduduk tertinggi di Kota Madiun berada di Kecamatan Taman yaitu sebanyak 85.727 jiwa (42,48%), disusul Kecamatan Manguharjo sebanyak 60.167 jiwa (29,82%), dan Kecamatan Kartoharjo sebanyak 55.866 jiwa (27,70%).

3. KAWASAN RAWAN BENCANA

Adapun potensi bencana yang ada di Kota Madiun antara lain:

a) **Bencana Alam Banjir**

- Kecamatan Kartoharjo:
 - Kelurahan Pilangbango
- Kecamatan Manguharjo:
 - Kelurahan Madiun Lor
 - Kelurahan Winongo
- Kecamatan Taman:
 - Kelurahan Manisrejo
 - Kelurahan Taman

b) **Bencana Alam Angin Puting Beliung**

- Kecamatan Kartoharjo:
 - Kelurahan Kanigoro
 - Kelurahan Kelun
 - Kelurahan Kartoharjo
 - Kelurahan Klegen
 - Kelurahan Oro – Oro Ombo
 - Kelurahan Rejomulyo
 - Kelurahan Sukosari
 - Kelurahan Tawangrejo.

- Kecamatan Manguharjo:
 - Kelurahan Madiun Lor
 - Kelurahan Winongo
 - Kelurahan Manguharjo
 - Kelurahan Nambangan Kidul
 - Kelurahan Nambangan Lor
 - Kelurahan Ngegong
 - Kelurahan Pangongangan
 - Kelurahan Sogaten
- Kecamatan Taman:
 - Kelurahan Banjarejo
 - Kelurahan Demangan
 - Kelurahan Josenan
 - Kelurahan Kejuron
 - Kelurahan Kuncen
 - Kelurahan Mojorejo
 - Kelurahan Pandean
 - Kelurahan Taman
 - Kelurahan Manisrejo

4. FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

a) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Kondisi pertumbuhan ekonomi dalam satu wilayah dipengaruhi beberapa faktor yang menyebabkan kondisinya bisa naik, stagnan atau bahkan menurun. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain kondisi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, ketersediaan modal, perkembangan teknologi dan kondisi sosial politik.

Untuk menganalisis kondisi perekonomian daerah dapat dilihat melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan basis data utama. Dengan menggunakan komponen PDRB, akan dapat teridentifikasi laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah yang merupakan indikator utama perekonomian daerah dan dapat menjadi salah satu tolak ukur dalam menggambarkan kondisi kesejahteraan penduduk. Informasi detail mengenai perkembangan PDRB Kota Madiun lima tahun terakhir disajikan sebagai berikut:

Tabel 1.2
Pertumbuhan PDRB Kota Madun Tahun 2018 – 2022

Tahun	PDRB ADHB (Miliar Rupiah)	PDRB ADHK (Miliar Rupiah)	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)
2018	13128,89	10051,29	5,96
2019	14107,34	10623,07	5,69
2020	13519,88	10055,91	-3,39
2021	14435,43	10537,70	4,73
2022	15825,61	11119,55	5,52
Rata - Rata			3,70

Sumber: BPS Kota Madiun (Kota Madiun Dalam Angka 2023)

Secara lebih rinci, PDRB di tahun 2022 struktur ekonomi masyarakat Kota Madiun didominasi oleh kontribusi sektor Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 26,64%, sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 14,47%, dan sektor Industri Pengolahan sebesar 13,26%. Walaupun pada laju pertumbuhannya sempat mengalami penurunan ekstrem karena dampak Covid-19, akan tetapi pada tahun berikutnya menunjukkan tren kenaikan yang positif.

b) Laju Inflasi

Secara garis besar, dalam lima tahun terakhir Kota Madiun didominasi dengan sasaran inflasi yang tercapai. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Madiun dapat menjaga harga komoditas sehingga harga terjangkau maupun dari segi daya beli masyarakat yang turun terutama pada saat terjadinya pandemi Covid-19 yang berakibat pada turunnya tingkat perputaran uang di Kota Madiun.

Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 yang disebabkan karena adanya kenaikan harga barang dan jasa dibandingkan pada bulan Desember 2021 dan hal ini juga terjadi pada taraf internasional.

Tabel 1.3
Tingkat Inflasi di Kota Madiun

Tahun	Inflasi (%)	Status
2018	2,71	Tercapai
2019	2,20	Tercapai
2020	1,86	Tidak Tercapai
2021	2,00	Tercapai
2022	5,80	Tidak Tercapai

Sumber: BPS Kota Madiun

D. TUGAS TIM PENERAPAN SPM

Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah berdasarkan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM tahun sebelumnya (N-1). Dalam pelaksanaannya tim penerapan SPM melakukan serangkaian proses perencanaan strategi yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM.

Strategi tim penerapan SPM dalam menyusun Rencana Aksi SPM Daerah adalah memperhatikan faktor internal dan eksternal yang ada pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM. Pendekatan yang digunakan oleh tim penerapan SPM dalam merumuskan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat inisiasi yang berisi solusi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh tim penerapan SPM dalam upaya memperbaiki capaian SPM, sehingga rumusan strategi Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah yang disusun merupakan suatu rangkaian hubungan yang saling mempengaruhi.

Dalam upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan, maka diperlukan konsistensi Perangkat Daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan Tim Penerapan SPM Daerah untuk memastikan dan mengawal bahwa:

1. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran;
2. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya; dan
3. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

BAB II
KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

A. KONDISI PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan

1. Bidang Pendidikan

Tabel 2.1.1 Kondisi Capaian Bidang Pendidikan di Kota Madiun Tahun 2022

Kota	SPM Bidang Pendidikan									Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pendidikan Anak Usia Dini			Pendidikan Dasar			Pendidikan Kesetaraan				
	Usia 5 (Lima) tahun sampai dengan 6 (Enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini			Usia 7 (Tujuh) Tahun sampai dengan 15 (Lima Belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar			Usia 7 (Tujuh) Tahun sampai dengan 18 (Delapan Belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan				
	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Madiun	2.607	2.607	100%	26.323	26.323	100%	175	175	100%	71.549.929.501,00	66.863.406.820,02

Sumber: Laporan SPM Kota Madiun Tahun 2022

2. Bidang Kesehatan

Tabel 2.1.2 Kondisi Capaian Bidang Kesehatan di Kota Madiun Tahun 2022

Kota	SPM Bidang Kesehatan																				
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			Pelayanan Kesehatan Balita			Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		
	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Madiun	2,470	2,470	100%	2,357	2,357	100%	2,245	2,245	100%	9,145	9,145	100%	31,855	31,855	100%	115,110	115,110	100%	29,585	29,585	100%

SPM Bidang Kesehatan															Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis			Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus yang Bersifat Peningkatan/Promotif dan Pencegahan/Preventif)				
Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
68,973	38,781	56%	8,143	8,143	100%	339	339	100%	5,184	5,184	100%	5,780	5,780	100%	5,054,158,410	4,599,106,484

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kota Madiun Tahun 2022

3. Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 2.1.3 Kondisi Capaian Bidang Pekerjaan Umum di Kota Madiun Tahun 2022

Kota	SPM Bidang Pekerjaan Umum						Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari			Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik				
	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Madiun	44.831	44.011	98.17%	44.831	42.706	99.72%	100.569.000,00	100.350.000,00

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kota Madiun Tahun 2022

4. Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 2.1.4 Kondisi Capaian Bidang Perumahan Rakyat di Kota Madiun Tahun 2022

Kota	SPM Bidang Perumahan Rakyat						Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Penyediaan dan Rahabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah			Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah daerah				
	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Madiun	(Tidak Terjadi Bencana)	(Tidak Terjadi Bencana)	100%	105	105	100%	3.407.604.960	3.044.196.874

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kota Madiun Tahun 2022

5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.1.5 Kondisi Capaian Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Madiun Tahun 2022

Kota	SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat															Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Pelayanan Informasi Rawan Bencana			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran				
	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Madiun	1	1	100%										45	45	100%	6.648.368.960	5.973.170.769

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kota Madiun Tahun 2022

Kota	SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat															Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Pelayanan Informasi Rawan Bencana			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran				
	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Madiun				153.367	153.367	100%	2.395	2.395	100%	156	156	100%				1.552.347.000	1.504.743.976

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kota Madiun Tahun 2022

6. Bidang Sosial

Tabel 2.1. Kondisi Capaian Bidang Sosial di Kota Madiun Tahun 2022

Kota	SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat															Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis Terlantar Diluar Panti			Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Pasca Bencana bagi korban Bencana Daerah				
	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Madiun	95	95	100%	460	460	100%	137	137	100%	92	72	72,86%	36	17	47,22%	Rp. 2,186,485,630	1.996.155.110

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kota Madiun Tahun 2022

B. PERMASALAHAN PEMENUHAN SPM (OPD PENGAMPU)

Dalam rangka pemenuhan pencapaian penerapan SPM di Kota Madiun, ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan

Dalam pelaksanaan penerapan SPM Bidang Pendidikan, terdapat permasalahan sebagai berikut:

1. Tidak adanya data anak usia 5-6 tahun yang tidak bersekolah
2. Tidak adanya data anak usia 7-15 tahun yang tidak berpartisipasi di satuan SD/SMP
3. Tidak adanya data anak usia 7-18 tahun yang belum bersekolah formal dan belum berpartisipasi di satuan pendidikan kesetaraan
4. Kurangnya Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan
5. Kurangnya Kompetensi dalam penggunaan aplikasi bidang pendidikan
6. Kurangnya Layanan disabilitas

2. Bidang Kesehatan

Dari 12 indikator SPM Bidang kesehatan, terdapat 1 indikator yang belum mencapai target, yaitu Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi dengan capaian sebesar 56% dari target 100%. Hal ini disebabkan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB kesulitan mencapai target karena target yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI terlalu tinggi. Penetapan target didasarkan dari hasil Riskesdas Tahun 2018 yang menggambarkan prevalensi Hipertensi di Kota Madiun sebesar 47,7%, artinya diperkirakan sebanyak 47,7% masyarakat di Kota Madiun yang berusia >15 tahun menderita Hipertensi, sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Upaya yang terus dilakukan untuk dapat memenuhi target diantaranya melalui kegiatan Posbindu PTM, Posbindu Sekolah, Posbindu OPD, Skrining Kesehatan di kegiatan Lintas Sektor maupun Lembaga Permasyarakatan Kota Madiun.

3. Bidang Pekerjaan Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standart Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Jenis Pelayanan Dasar SPM Pekerjaan Umum terdiri atas pemenuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.

Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Madiun dalam melaksanakan pelayanan SPM sampai dengan tahun 2024 dibantu oleh PDAM sebagai pelaksana dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dimana cakupan pelayanan air limbah domestik yang berasal dari pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. Sedangkan untuk limbah usaha dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Pada saat ini Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang belum mempunyai nomenklatur terkait Limbah Domestik sehingga penyediaan pelayanan limbah domestik dilaksanakannya oleh dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal terdapat lampiran yang harus dilengkapi dan dibutuhkan survey lapangan. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang melakukan koordinasi dengan PDAM terkait data jaringan perpipaan dan Dinas Kesehatan terkait data jaringan bukan perpipaan.

Sebagai penyusun laporan SPM harus koordinasi dengan perangkat daerah terkait sehingga memerlukan waktu dalam kecukupan data SPM.

4. Bidang Perumahan Rakyat

Permasalahan yang ditemui selama pelaksanaan penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

1. Untuk permasalahan yang dihadapi oleh Kota Madiun terkait korban yang terkena bencana adalah warga atau korban relokasi tidak bersedia pindah dikarenakan lokasi rumah susun yang disediakan untuk korban bencana lokasinya terlalu jauh dengan mereka tinggal, dan ada anaknya yang masih sekolah dan tempat sekolahnya terlalu jauh dengan lokasi rumah susun yang disediakan oleh Pemerintah; dan
2. Untuk penyediaan rumah layak huni terkendala terkait ketersediaan lahan yang semakin menipis khususnya di kawasan perkotaan.

5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan-permasalahan yang ada pada Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat diantaranya:

1. Masih adanya pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah Kota Madiun.
2. Kurang kesadaran Masyarakat dalam mentaati peraturan.

3. Adanya lintasan kereta api yang melintasi jalan raya, sehingga menimbulkan waktu response time rate kebakaran tidak tercapai apabila terjadi kebakaran di area utara wilayah Kota Madiun.
4. Anggaran yang terbatas.
5. Minimnya peralatan penanggulangan bencana.
6. Kurangnya logistik dalam pemenuhan penanggulangan bencana.

6. Bidang Sosial

1. Pengumpulan data dilakukan berdasarkan capaian kinerja pada tahun sebelumnya (proyeksi jumlah klien) dikarenakan tidak bisa merinci secara pasti kebutuhan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis dan Korban Bencana karena sifatnya insidental ketika terjadi kasus;
2. Perhitungan kebutuhan dilakukan berdasarkan capaian kinerja pada tahun sebelumnya (proyeksi jumlah klien) dikarenakan tidak bisa merinci secara pasti kebutuhan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis dan Korban Bencana karena sifatnya insidental ketika terjadi kasus;
3. Perencanaan dan penganggaran dilakukan berdasarkan capaian kinerja pada tahun sebelumnya (proyeksi jumlah klien) dikarenakan tidak bisa merinci secara pasti kebutuhan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis dan Korban Bencana karena sifatnya insidental ketika terjadi kasus; dan
4. Sumber Daya Manusia yang jumlahnya terbatas dan Sarana Prasarana yang masih kurang sehingga pelayanan tidak berjalan optimal.

BAB III

STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah Kota Madiun telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor ... Tahun 2023.

Untuk mencapai pemenuhan SPM, diperlukan pemilihan strategi dan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan pemenuhan SPM. Selain itu, Tim Penerapan SPM juga diperkuat dengan dukungan anggaran yang cukup serta pengintegrasian program, kegiatan, dan sub kegiatan pemenuhan SPM ke dalam dokumen perencanaan daerah.

A. STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENCANA SPM

Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tertuang sebagai berikut:

1. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket/Unit
			2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Kartoharjo)	Satuan Pendidikan
			3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Kartoharjo)	Satuan Pendidikan
			4	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Klegen)	Satuan Pendidikan
			5	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Klegen)	Satuan Pendidikan
			6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Klegen)	Satuan Pendidikan
			7	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 04 Klegen)	Satuan Pendidikan
			8	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Oro Oro Ombo)	Satuan Pendidikan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			9 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Rejomulyo)	Satuan Pendidikan
			10 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Kanigoro)	Satuan Pendidikan
			11 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Kanigoro)	Satuan Pendidikan
			12 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Kanigoro)	Satuan Pendidikan
			13 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Sukosari)	Satuan Pendidikan
			14 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Pilangbango)	Satuan Pendidikan
			15 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Tawangrejo)	Satuan Pendidikan
			16 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Tawangrejo)	Satuan Pendidikan
			17 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Kelun)	Satuan Pendidikan
			18 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Manguharjo)	Satuan Pendidikan
			19 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Nambangan Lor)	Satuan Pendidikan
			20 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Nambangan Lor)	Satuan Pendidikan
			21 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Madiun Lor)	Satuan Pendidikan
			22 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Madiun Lor)	Satuan Pendidikan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Madiun Lor)	Satuan Pendidikan
			24 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 04 Madiun Lor)	Satuan Pendidikan
			25 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 05 Madiun Lor)	Satuan Pendidikan
			26 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Nambangan Kidul)	Satuan Pendidikan
			27 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Nambangan Kidul)	Satuan Pendidikan
			28 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Nambangan Kidul)	Satuan Pendidikan
			29 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Winongo)	Satuan Pendidikan
			30 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Winongo)	Satuan Pendidikan
			31 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Ngegong)	Satuan Pendidikan
			32 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Patihan)	Satuan Pendidikan
			33 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Pangongangan)	Satuan Pendidikan
			34 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Sogaten)	Satuan Pendidikan
			35 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Taman)	Satuan Pendidikan
			36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Taman)	Satuan Pendidikan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			37 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Taman)	Satuan Pendidikan
			38 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Pandean)	Satuan Pendidikan
			39 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Pandean)	Satuan Pendidikan
			40 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Banjarejo)	Satuan Pendidikan
			41 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Mojorejo)	Satuan Pendidikan
			42 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Mojorejo)	Satuan Pendidikan
			43 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Manisrejo)	Satuan Pendidikan
			44 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Manisrejo)	Satuan Pendidikan
			45 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Manisrejo)	Satuan Pendidikan
			46 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 04 Manisrejo)	Satuan Pendidikan
			47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Demangan)	Satuan Pendidikan
			48 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Demangan)	Satuan Pendidikan
			49 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Josenan)	Satuan Pendidikan
			50 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Josenan)	Satuan Pendidikan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
			51	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Josenan)	Satuan Pendidikan
			52	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Kejuron)	Satuan Pendidikan
			53	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Kuncen)	Satuan Pendidikan
			54	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta Didik
			55	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan
			56	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Kartoharjo)	Satuan Pendidikan
			57	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Kartoharjo)	Satuan Pendidikan
			58	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Klegen)	Satuan Pendidikan
			59	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Klegen)	Satuan Pendidikan
			60	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Klegen)	Satuan Pendidikan
			61	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 04 Klegen)	Satuan Pendidikan
			62	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Oro Oro Ombo)	Satuan Pendidikan
			63	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Rejomulyo)	Satuan Pendidikan
			64	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Kanigoro)	Satuan Pendidikan
			65	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Kanigoro)	Satuan Pendidikan
			66	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Kanigoro)	Satuan Pendidikan
			67	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Sukosari)	Satuan Pendidikan
			68	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Pilangbango)	Satuan Pendidikan
			69	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Tawangrejo)	Satuan Pendidikan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
			70	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Tawangrejo)	Satuan Pendidikan
			71	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Kelun)	Satuan Pendidikan
			72	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Manguharjo)	Satuan Pendidikan
			73	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Nambangan Lor)	Satuan Pendidikan
			74	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Nambangan Lor)	Satuan Pendidikan
			75	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Madiun Lor)	Satuan Pendidikan
			76	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Madiun Lor)	Satuan Pendidikan
			77	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Madiun Lor)	Satuan Pendidikan
			78	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 04 Madiun Lor)	Satuan Pendidikan
			79	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 05 Madiun Lor)	Satuan Pendidikan
			80	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Nambangan Kidul)	Satuan Pendidikan
			81	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Nambangan Kidul)	Satuan Pendidikan
			82	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Nambangan Kidul)	Satuan Pendidikan
			83	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Winongo)	Satuan Pendidikan
			84	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Winongo)	Satuan Pendidikan
			85	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Ngegong)	Satuan Pendidikan
			86	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Patihan)	Satuan Pendidikan
			87	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Pangongangan)	Satuan Pendidikan
			88	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Sogaten)	Satuan Pendidikan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
			89	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Taman)	Satuan Pendidikan
			90	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Taman)	Satuan Pendidikan
			91	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Taman)	Satuan Pendidikan
			92	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Pandean)	Satuan Pendidikan
			93	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Pandean)	Satuan Pendidikan
			94	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Banjarejo)	Satuan Pendidikan
			95	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Mojorejo)	Satuan Pendidikan
			96	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Mojorejo)	Satuan Pendidikan
			97	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Manisrejo)	Satuan Pendidikan
			98	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Manisrejo)	Satuan Pendidikan
			99	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Manisrejo)	Satuan Pendidikan
			100	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 04 Manisrejo)	Satuan Pendidikan
			101	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Demangan)	Satuan Pendidikan
			102	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Demangan)	Satuan Pendidikan
			103	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Josenan)	Satuan Pendidikan
			104	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Josenan)	Satuan Pendidikan
			105	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Josenan)	Satuan Pendidikan
			106	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Kejuron)	Satuan Pendidikan
			107	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Kuncen)	Satuan Pendidikan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
			108	Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen
			109	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
			110	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang
			2	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
			3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 1)	Satuan Pendidikan
			4	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 2)	Satuan Pendidikan
			5	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 3)	Satuan Pendidikan
			6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 4)	Satuan Pendidikan
			7	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 5)	Satuan Pendidikan
			8	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 6)	Satuan Pendidikan
			9	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 7)	Satuan Pendidikan
			10	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 8)	Satuan Pendidikan
			11	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 9)	Satuan Pendidikan
			12	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 10)	Satuan Pendidikan
			13	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 11)	Satuan Pendidikan
			14	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 12)	Satuan Pendidikan
			15	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 13)	Satuan Pendidikan
			16	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 14)	Satuan Pendidikan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
			17	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta Didik
			18	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan
			19	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 1)	Satuan Pendidikan
			20	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 2)	Satuan Pendidikan
			21	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 3)	Satuan Pendidikan
			22	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 4)	Satuan Pendidikan
			23	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 5)	Satuan Pendidikan
			24	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 6)	Satuan Pendidikan
			25	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 7)	Satuan Pendidikan
			26	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 8)	Satuan Pendidikan
			27	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 9)	Satuan Pendidikan
			28	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 10)	Satuan Pendidikan
			29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 11)	Satuan Pendidikan
			30	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 12)	Satuan Pendidikan
			31	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 13)	Satuan Pendidikan
			32	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 14)	Satuan Pendidikan
			33	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan kekerasan dan intoleransi	Kegiatan
			34	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang	Unit

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			Kelas/Ruang Guru PAUD	
			2 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit
			3 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Paket
			4 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Peserta Didik
			5 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang
			6 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan
			7 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Satuan Pendidikan
			8 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan kekerasan dan intoleransi	Kegiatan
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan
			2 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dokumen
			2 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dokumen
			3 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Orang
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Dokumen
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen
			2 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan

2. SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang
			2	1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang
			3	1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang
			4	1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Orang
			5	1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang
			6	1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Orang
			7	1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Orang
			8	1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Orang
			9	1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang
			10	1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang
			11	1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang
			12	1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang

3. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum	Pengelola dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota	1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Dokumen

4. SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Dokumen
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Operasioanal dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun dan/atau Rumah Khusus	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Laporan

5. SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Laporan
			2 Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kasus
			3 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN			
1	2	3	4	5			
			4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen		
			5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang		
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Laporan		
			2	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Dokumen		
		2	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
					2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan
Inspeksi Peralatan dan Proteksi Kebakaran	1			Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan		

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
1	Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kab/Kota	Dokumen
			2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi (KIE) Rawan BEncana Kab/Kota (per jenis bencana)	Orang
		Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1	Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Kab/Kota	Orang
			2	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan

1	2	3	4	5	1
			3	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kab/Kota	Orang
		Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	1	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	Orang
			2	Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	Orang

6. SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Orang
			2	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Orang
			3	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Orang
			4	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang
			5	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Orang
			6	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Orang
			7	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	Orang
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial	1	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	Orang
3	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota	1	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Orang
			2	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Orang
			3	Sub Kegiatan Pelayanan dukungan Psikososial	Orang

B. MATRIKS RENCANA AKSI SPM

Tabel 3.2.1 Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan di Kota Madiun Tahun 2023-2027

No	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan Dasar	Tahun Dasar (M)	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana					
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
			3	4	5	6	7				8	9	10	11	12				13	14	15	16	17				18	19	20	21	22				23	24	25	26	27				28	29	30	31	32
1	Pendidikan Anak Usia Dini (Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD)	2022	2.607	3.000			Rp 9.602.462.038		Dinas Pendidikan	2733	2733			Rp 4.407.085.060		Dinas Pendidikan	2.859	2.859			Rp 4.194.775.370		Dinas Pendidikan	2.985	2.985			Rp 4.194.775.370		Dinas Pendidikan	3.111	3.111			Rp 4.194.775.370		Dinas Pendidikan										
1	Angka partisipasi sekolah				84,34	84,34	Rp 4.422.900.000	0	APBN	Dinas Pendidikan			84,94	84,94	Rp 99.660.000	0	APBN	Dinas Pendidikan			85,34	85,34	Rp 99.660.000	0	APBN	Dinas Pendidikan			85,84	85,84	Rp 99.660.000	0	APBD	Dinas Pendidikan			86,34	86,34	Rp 99.660.000	0	APBD	Dinas Pendidikan					
2	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B				90,79	91,03	Rp 1.322.090.038	0	APBD	Dinas Pendidikan			92,13	92,13	Rp 580.832.170	0	APBD	Dinas Pendidikan			93,23	93,23	Rp 416.075.370	0	APBD	Dinas Pendidikan			94,3	94,3	Rp 416.075.370	0	APBD	Dinas Pendidikan			95,4	95,4	Rp 416.075.370	0	APBD	Dinas Pendidikan					
3	Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV				80,3	90,5	Rp 2.160.000.000	0	APBD	Dinas Pendidikan			91,6	91,6	Rp 2.138.400.000	0	APBD	Dinas Pendidikan			92,7	92,7	Rp 2.138.400.000	0	APBD	Dinas Pendidikan			93,8	93,8	Rp 2.138.400.000	0	APBD	Dinas Pendidikan			94,9	94,9	Rp 2.138.400.000	0	APBD	Dinas Pendidikan					
4	Rasio pegawai sekolah untuk PAUD				22,75	22,75	Rp 112.644.000	0	APBD	Dinas Pendidikan			23,85	23,85	Rp 70.259.390	0	APBD	Dinas Pendidikan			24,95	24,95	Rp 50.330.000	0	APBD	Dinas Pendidikan			26,1	26,1	Rp 50.330.000	0	APBD	Dinas Pendidikan			27,2	27,2	Rp 50.330.000	0	APBD	Dinas Pendidikan					
5	Ketukupan formasi guru ASN				0	0	Rp 80.460.000	0	APBD	Dinas Pendidikan			0	0	Rp 50.185.278	0	APBD	Dinas Pendidikan			0	0	Rp 35.950.000	0	APBD	Dinas Pendidikan			0,0	0,0	Rp 35.950.000	0	APBD	Dinas Pendidikan			0,0	0,0	Rp 35.950.000	0	APBD	Dinas Pendidikan					
6	Indeks distribusi guru				1	0	Rp 64.368.000	0	APBD	Dinas Pendidikan			1,1	1,1	Rp 40.148.222	0	APBD	Dinas Pendidikan			2,2	2,2	Rp 28.760.000	0	APBD	Dinas Pendidikan			3,3	3,3	Rp 28.760.000	0	APBD	Dinas Pendidikan			4,4	4,4	Rp 28.760.000	0	APBD	Dinas Pendidikan					
7	Proporsi PTK bersertifikat				71,61	73,1	Rp 360.000.000	0	APBD	Dinas Pendidikan			74,2	74,2	Rp 356.400.000	0	APBD	Dinas Pendidikan			75,3	75,3	Rp 356.400.000	0	APBD	Dinas Pendidikan			76,4	76,4	Rp 356.400.000	0	APBD	Dinas Pendidikan			77,5	77,5	Rp 356.400.000	0	APBD	Dinas Pendidikan					
8	Proporsi PTK penggerak				0	0,12	Rp 360.000.000	0	APBD	Dinas Pendidikan			1,2	1,2	Rp 356.400.000	0	APBD	Dinas Pendidikan			2,3	2,3	Rp 356.400.000	0	APBD	Dinas Pendidikan			3,4	3,4	Rp 356.400.000	0	APBD	Dinas Pendidikan			4,5	4,5	Rp 356.400.000	0	APBD	Dinas Pendidikan					
9	Pengalaman pelatihan guru				0	0	Rp 720.000.000	0	APBD	Dinas Pendidikan			0	0	Rp 712.800.000	0	APBD	Dinas Pendidikan			0	0	Rp 712.800.000	0	APBD	Dinas Pendidikan			0	0	Rp 712.800.000	0	APBD	Dinas Pendidikan			0	0	Rp 712.800.000	0	APBD	Dinas Pendidikan					
2	Pendidikan Dasar (Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar)	2022	26.323	30.270			Rp 104.572.015.400	0	Dinas Pendidikan	26.473	26.473			Rp 23.373.627.844	0	Dinas Pendidikan	26.623	26.623			Rp 41.152.203.217	0	Dinas Pendidikan	26.773	26.773			Rp 41.152.203.217	0	Dinas Pendidikan	26.923	26.923			Rp 41.152.203.217	0	APBD	Dinas Pendidikan									
Sekolah Dasar (SD)							Rp 76.789.948.336	0						Rp 10.620.130.288	0	APBD					Rp 19.180.040.000	0	APBD				Rp 19.180.040.000	0	APBD					Rp 19.180.040.000	0												
1	Angka partisipasi dasar				131,02	138,55	Rp 14.381.554.601	0	APBD	Dinas Pendidikan			138,55	138,55	Rp 1.910.619.619	0	APBD	Dinas Pendidikan			138,55	138,55	Rp 3.549.526.800	0	APBD	Dinas Pendidikan			138,55	138,55	Rp 3.549.526.800	0	APBD	Dinas Pendidikan			138,55	138,55	Rp 3.549.526.800	0	APBD	Dinas Pendidikan					
2	Angka partisipasi sekolah				78,57	78,57	Rp 14.381.554.601	0	APBD	Dinas Pendidikan			79,77	79,77	Rp 1.910.619.619	0	APBD	Dinas Pendidikan			80,97	80,97	Rp 3.549.526.800	0	APBD	Dinas Pendidikan			82,17	82,17	Rp 3.549.526.800	0	APBD	Dinas Pendidikan			83,37	83,37	Rp 3.549.526.800	0	APBD	Dinas Pendidikan					
3	Angka partisipasi murni				122,11	129,57	Rp 13.624.630.674	0	APBD	Dinas Pendidikan			129,57	129,57	Rp 1.810.060.692	0	APBD	Dinas Pendidikan			129,57	129,57	Rp 3.362.709.600	0	APBD	Dinas Pendidikan			129,57	129,57	Rp 3.362.709.600	0	APBD	Dinas Pendidikan			129,57	129,57	Rp 3.362.709.600	0	APBD	Dinas Pendidikan					
4	Kemampuan literasi				85,99	89,06	Rp 12.110.782.822	0	APBD	Dinas Pendidikan			90,16	90,16	Rp 1.608.942.837	0	APBD	Dinas Pendidikan			91,26	91,26	Rp 2.989.075.200	0	APBD	Dinas Pendidikan			92,36	92,36	Rp 2.989.075.200	0	APBD	Dinas Pendidikan			93,46	93,46	Rp 2.989.075.200	0	APBD	Dinas Pendidikan					
5	Kemampuan numerasi				56,3	72,29	Rp 12.110.782.822	0	APBN	Dinas Pendidikan			73,39	73,39	Rp 1.608.942.837	0	APBN	Dinas Pendidikan			74,49	74,49	Rp 2.989.075.200	0	APBN	Dinas Pendidikan			75,59	75,59	Rp 2.989.075.200	0	APBN	Dinas Pendidikan			76,69	76,69	Rp 2.989.075.200	0	APBN	Dinas Pendidikan					
6	Perbedaan Skor Literasi				3,05	2,59	Rp 4.541.543.558	0	APBD	Dinas Pendidikan			2,13	2,13	Rp 603.353.364	0	APBD	Dinas Pendidikan			1,67	1,67	Rp 1.120.903.200	0	APBD	Dinas Pendidikan			1,21	1,21	Rp 1.120.903.200	0	APBD	Dinas Pendidikan			0,75	0,75	Rp 1.120.903.200	0	APBD	Dinas Pendidikan					
7	Perbedaan Skor numerasi				0,74	1,4	Rp 4.541.543.558	0	APBD	Dinas Pendidikan			1,2	1,2	Rp 603.353.364	0	APBD	Dinas Pendidikan			1	1	Rp 1.120.903.200	0	APBD	Dinas Pendidikan			0,8	0,8	Rp 1.120.903.200	0	APBD	Dinas Pendidikan			0,6	0,6	Rp 1.120.903.200	0	APBD	Dinas Pendidikan					
8	Indeks himi keamanan				75,13	74,97	Rp 258.791.880	0	Dinas Pendidikan			76,07	76,07	Rp 113.280.000	0	APBD	Dinas Pendidikan			77,17	77,17	Rp 118.800.000	0	APBD	Dinas Pendidikan			78,27	78,27	Rp 118.800.000	0	APBD	Dinas Pendidikan			79,37	79,37	Rp 118.800.000	0	APBD	Dinas Pendidikan						
9	Indeks himi kesehatan dan inklusivitas				59,23	65,84	Rp 388.187.820	0	APBD	Dinas Pendidikan			66,935	66,935	Rp 169.920.000	0	APBD	Dinas Pendidikan			68,035	68,035	Rp 178.200.000	0	APBD	Dinas Pendidikan			69,135	69,135	Rp 178.200.000	0	APBD	Dinas Pendidikan			70,235	70,235	Rp 178.200.000	0	APBD	Dinas Pendidikan					
10	Ketukupan formasi guru ASN				34,36	41,5	Rp 80.460.000	0	APBD	Dinas Pendidikan			42,6	42,6	Rp 50.185.278	0	APBD	Dinas Pendidikan			43,7	43,7	Rp 35.950.000	0	APBD	Dinas Pendidikan			44,8	44,8	Rp 35.950.000	0	APBD	Dinas Pendidikan			45,9	45,9	Rp 35.950.000	0	APBD	Dinas Pendidikan					
11	Indeks distribusi guru				0,96	0,43	Rp 64.368.000	0	APBD	Dinas Pendidikan			1,53	1,53	Rp 40.148.222	0	APBD	Dinas Pendidikan			2,63	2,63	Rp 28.760.000	0	APBD	Dinas Pendidikan			3,73	3,73	Rp 28.760.000	0	APBD	Dinas Pendidikan			4,83	4,83	Rp 28.760.000	0	APBD	Dinas Pendidikan					
12	Proporsi PTK bersertifikat				67,68	95,25	Rp 112.644.000	0	APBD	Dinas Pendidikan			96,35	96,35	Rp 70.259.389	0	APBD	Dinas Pendidikan			97,45	97,45	Rp 50.330.000	0	APBD	Dinas Pendidikan			98,55	98,55	Rp 50.330.000	0	APBD	Dinas Pendidikan			99,65	99,65	Rp 50.330.000	0	APBD	Dinas Pendidikan					
13	Proporsi PTK penggerak				0	0	Rp 112.644.000	0	APBD	Dinas Pendidikan			0	0	Rp 70.259.389	0	APBD	Dinas Pendidikan			0	0	Rp 50.330.000	0	APBD	Dinas Pendidikan			0	0	Rp 50.330.000	0	APBD	Dinas Pendidikan			0	0	Rp 50.330.000	0	APBD	Dinas Pendidikan					
14	Pengalaman pelatihan guru				4,5	91,4	Rp 80.460.000	0	APBD	Dinas Pendidikan			92,5	92,5	Rp 50.185.278	0	APBD	Dinas Pendidikan			93,6	93,6	Rp 35.950.000	0	APBD	Dinas Pendidikan			94,7	94,7	Rp 35.950.000	0	APBD	Dinas Pendidikan			95,8	95,8	Rp 35.950.000	0	APBD	Dinas Pendidikan					

Tabel 3.2.2 Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kota Madiun Tahun 2023 – 2027

No	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan Dasar	Tahun Dasar (M)	Pencapaian SPM (2023)					Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)				
			Perencana Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Realisasi					Perencana Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Realisasi					Perencana Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Realisasi					Perencana Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Realisasi					Perencana Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Realisasi
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2022	2.450	2.450			Rp1.047.548.600	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	2.430	2.430			Rp1.063.261.829	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	2.410	2.410			Rp907.907.846	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	2.390	2.390			Rp914.518.958	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	2.370	2.370			Rp941.954.527	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	
11	Vaksin Tetanus Difteri (Td)			2.450	2.450				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.430	2.430			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.410	2.410			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.390	2.390			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.370	2.370			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
2	Falset tambah darah			220.500	220.500				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		218.700	218.700			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		216.900	216.900			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		215.100	215.100			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		213.300	213.300			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan			2.450	2.450				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.430	2.430			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.410	2.410			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.390	2.390			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.370	2.370			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
4	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB			2.450	2.450				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.430	2.430			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.410	2.410			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.390	2.390			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.370	2.370			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
5	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah			2.450	2.450				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.430	2.430			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.410	2.410			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.390	2.390			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.370	2.370			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin			2.450	2.450				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.430	2.430			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.410	2.410			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.390	2.390			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.370	2.370			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
7	Kartu Ibu/rekam medis ibu			2.450	2.450				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.430	2.430			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.410	2.410			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.390	2.390			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.370	2.370			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
8	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)			2.450	2.450				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.430	2.430			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.410	2.410			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.390	2.390			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.370	2.370			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
9	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan			60	60				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		60	60			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		60	60			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		60	60			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		60	60			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
10	Tenaga kesehatan : Bidan			304	304				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		304	304			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		304	304			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		304	304			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		304	304			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
11	Tenaga kesehatan : Perawat			69	69				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		69	69			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		69	69			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		69	69			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		69	69			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
12	Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga			2.450	2.450				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.430	2.430			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.410	2.410			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.390	2.390			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.370	2.370			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2022	2.338	2.338			Rp49.007.200	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	2.319	2.319			Rp49.742.308	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	2.300	2.300			Rp63.937.172	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	2.281	2.281			Rp193.208.231	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	2.262	2.262			Rp199.004.478	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	
11	Formulir Partograf			2.338	2.338				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.319	2.319			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.300	2.300			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.281	2.281			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.262	2.262			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
2	Kartu Ibu (rekam media)			2.450	2.450				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.319	2.319			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.300	2.300			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.281	2.281			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.262	2.262			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)			2.450	2.450				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.319	2.319			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.300	2.300			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.281	2.281			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.262	2.262			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
4	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan dan kandungan			49	49				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		49	49			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		49	49			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		49	49			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		49	49			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
5	Tenaga kesehatan : Bidan			304	304				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		304	304			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		304	304			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		304	304			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		304	304			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
6	Tenaga kesehatan : Perawat			69	69				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		69	69			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		69	69			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		69	69			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		69	69			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	2022	2.227	2.227			Rp84.232.800	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	2.210	2.210			Rp85.496.292	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	2.193	2.193			Rp89.512.041	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	2.176	2.176			Rp154.566.884	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	2.159	2.159			Rp159.203.582	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	
11	Vaksin Hepatitis B0			2.227	2.227				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.210	2.210			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.193	2.193			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.176	2.176			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.159	2.159			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
2	Vitamin K1 injeksi			2.227	2.227				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.210	2.210			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.193	2.193			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.176	2.176			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.159	2.159			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
3	Salep/tes mata antibiotik			2.227	2.227				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.210	2.210			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.193	2.193			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.176	2.176			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.159	2.159			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
4	Formulir bayi baru lahir			2.227	2.227				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.210	2.210			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.193	2.193			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.176	2.176			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.159	2.159			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
5	Formulir Manajemen Perilaku Bayi Muda (MTMB)			2.227	2.227				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.210	2.210			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.193	2.193			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.176	2.176			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.159	2.159			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)			2.450	2.450				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.210	2.210			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.193	2.193			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.176	2.176			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		2.159	2.159			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
7	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak			17	17				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		17	17			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		17	17			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		17	17			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		17	17			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
8	Tenaga kesehatan : Bidan			304	304				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		304	304			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		304	304			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		304	304			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		304	304			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
9	Tenaga kesehatan : Perawat			69	69				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		69	69			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		69	69			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		69	69			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		69	69			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB

4	Pelayanan Kesehatan Balita	2022	9.081	9.081			Rp268.321.000	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	9.031	9.031			Rp272.345.815	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	8.981	8.981			Rp242.961.255	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	8.941	8.941			Rp283.372.071	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	8.911	8.911			Rp291.873.233	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB							
1	Kuisiner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku				11.317	11.317		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			9.031	9.031		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			8.981	8.981				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			8.941	8.941				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			8.911	8.911				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)				11.317	11.317		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			9.031	9.031		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			8.981	8.981				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			8.941	8.941				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			8.911	8.911				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	
3	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)				2.450	2.450		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			9.031	9.031		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			8.981	8.981				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			8.941	8.941				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			8.911	8.911				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	
4	Vitamin A Biru				4.100	4.100		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			2.210	2.210		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB				2.193	2.193				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			2.176	2.176				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			2.159	2.159				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
5	Vitamin A Merah				29.250	29.250		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			9.031	9.031		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			8.981	8.981				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			8.941	8.941				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			8.911	8.911				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	
6	Vaksin imunisasi dasar: HibD				2.214	2.214		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			2.210	2.210		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB				2.193	2.193				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			2.176	2.176				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			2.159	2.159				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
7	Vaksin imunisasi dasar: BCG				2.202	2.202		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			2.210	2.210		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB				2.193	2.193				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			2.176	2.176				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			2.159	2.159				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
8	Vaksin imunisasi dasar: Polio				9.216	9.216		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			2.210	2.210		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB				2.193	2.193				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			2.176	2.176				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			2.159	2.159				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
9	Vaksin imunisasi dasar: IPV				2.324	2.324		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			2.348	2.348		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB				2.293	2.293				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			2.238	2.238				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			2.183	2.183				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
10	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib				7.020	7.020		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			2.348	2.348		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB				2.293	2.293				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			2.238	2.238				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			2.183	2.183				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
11	Vaksin imunisasi dasar: Campak				2.359	2.359		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			2.348	2.348		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB				2.293	2.293				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			2.238	2.238				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			2.183	2.183				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
12	Vaksin imunisasi dasar: Rubella				2.359	2.359		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			2.348	2.348		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB				2.293	2.293				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			2.238	2.238				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			2.183	2.183				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
13	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib				2.346	2.346		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			2.403	2.403		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB				2.348	2.348				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			2.293	2.293				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			2.238	2.238				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
14	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak				2.363	2.363		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			2.403	2.403		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB				2.348	2.348				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			2.293	2.293				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			2.238	2.238				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
15	Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella				2.363	2.363		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			2.403	2.403		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB				2.348	2.348				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			2.293	2.293				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			2.238	2.238				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
16	Harum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)				17.000	17.000		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			9.031	9.031		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			8.981	8.981				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			8.941	8.941				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			8.911	8.911				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	
17	Peralatan Anafilaktik				30	30		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			25	25		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB				24	24				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			24	24				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			24	24				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
18	Tenaga kesehatan : Dokter				17	17		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			17	17		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB				17	17				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			17	17				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			17	17				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
19	Tenaga kesehatan : Bidan				304	304		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			304	304		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB				304	304				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			304	304				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			304	304				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
20	Tenaga kesehatan : Perawat				69	69		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			69	69		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB				69	69				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			69	69				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			69	69				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
21	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi				14	14		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			14	14		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB				14	14				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			14	14				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			14	14				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
22	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan				756	756		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			756	756		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB				756	756				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			756	756				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			756	756				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
23	Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD				75	75		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			75	75		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB				75	75				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			75	75				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			75	75				0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB

6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	2022	31.582	31.582			Rp129.673.500	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	31.582	31.582			Rp131.618.603	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	31.582	31.582			Rp102.299.476	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	31.582	31.582			Rp128.805.487	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	31.582	31.582			Rp132.669.652	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
1	Buku raport kesehatanku				2.960	2.960		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			2.960	2.960		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			2.960	2.960		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			2.960	2.960		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			2.960	2.960		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
2	Buku penunantuan kesehatan				2.960	2.960		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			2.960	2.960		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			2.960	2.960		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			2.960	2.960		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			2.960	2.960		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
3	Kuisioner skrining kesehatan				31.582	31.582		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			31.582	31.582		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			31.582	31.582		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			31.582	31.582		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			31.582	31.582		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah				160	160		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			182	182		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			182	182		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			182	182		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			182	182		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah				17	17		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			17	17		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			17	17		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			17	17		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			17	17		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
6	Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi				45	45		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			45	45		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			45	45		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			45	45		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			45	45		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
7	Tenaga kesehatan : Bidan				68	68		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			68	68		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			68	68		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			68	68		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			68	68		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
8	Tenaga kesehatan : Perawat				69	69		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			69	69		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			69	69		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			69	69		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			69	69		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
9	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi				14	14		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			14	14		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			14	14		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			14	14		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			14	14		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
10	Tenaga Kesehatan : Masyarakat				22	22		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			22	22		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			22	22		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			22	22		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			22	22		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
11	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan				683	683		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			683	683		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			683	683		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			683	683		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			683	683		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
12	Tenaga Non kesehatan : Guru				132	132		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			132	132		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			132	132		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			132	132		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			132	132		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
6	Pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	2023	114.664	114.664			Rp71.855.200	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	129.400	129.400			Rp72.933.028	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	129.950	129.950			Rp63.937.172	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	130.440	130.440			Rp154.566.584	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	130.820	130.820			Rp159.203.582	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
1	Pedoman dan media Komunikasi, Informatik, Edukasi (KIE)				6	6		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			6	6		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			6	6		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			6	6		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			6	6		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
2	Alat ukur berat badan				110	110		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			110	110		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			110	110		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			110	110		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			110	110		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
3	Alat : Alat ukur tinggi badan				110	110		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			110	110		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			110	110		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			110	110		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			110	110		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
4	Alat : Alat ukur lingkar perut				110	110		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			110	110		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			110	110		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			110	110		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			110	110		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
5	Alat : Tensimeter				110	110		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			110	110		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			110	110		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			110	110		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			110	110		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
6	Alat : Glukometer				110	110		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			110	110		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			110	110		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			110	110		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			110	110		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
7	Alat : Tes strip gula darah				110	110		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			110	110		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			110	110		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			110	110		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			110	110		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
8	Alat : Lancet				114.664	114.664		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	129.400	129.400			129.950	129.950	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	130.440	130.440			130.440	130.440	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	130.820	130.820			130.820	130.820			130.820	130.820		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
9	Alat : Kapas alkohol				114.664	114.664		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	129.400	129.400			129.950	129.950	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	130.440	130.440			130.440	130.440	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	130.820	130.820			130.820	130.820			130.820	130.820		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
10	Alat : KIT IVA Tes				114.664	114.664		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	129.400	129.400			129.950	129.950	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	130.440	130.440			130.440	130.440	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	130.820	130.820			130.820	130.820			130.820	130.820		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
11	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)				6	6		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			6	6		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			6	6		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			6	6		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			6	6		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
12	Tenaga kesehatan : Dokter				34	34		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			34	34		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			34	34		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			34	34		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			34	34		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
13	Tenaga kesehatan : Bidan				68	68		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			68	68		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			68	68		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			68	68		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			68	68		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
14	Tenaga kesehatan : Perawat				69	69		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			69	69		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			69	69		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			69	69		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			69	69		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
15	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi				14	14		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			14	14		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			14	14		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			14	14		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			14	14		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
16	Tenaga Kesehatan Masyarakat				22	22		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			22	22		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			22	22		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			22	22		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			22	22		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
17	Tenaga non kesehatan Perlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu				421	421		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			421	421		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			421	421		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			421	421		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			421	421		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB

7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	2022	30.573	30.573			Rp77.139.600	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	33.410	33.410			Rp78.296.694	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	34.490	34.490			Rp255.748.689	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	35.580	35.580			Rp257.610.974	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	36.700	36.700			Rp265.339.303	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		
1	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol				28.500	28.500		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			33.744	33.744		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			34.834	34.834			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			35.935	35.935		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			37.067	37.067			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
2	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Penggabian Paripurna Pasien Geriatric (P3G)				30.573	30.573		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			33.410	33.410		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			34.490	34.490			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			35.580	35.580		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			36.700	36.700			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
3	Buku kesehatan lansia				30.573	30.573		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			33.410	33.410		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			34.490	34.490			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			35.580	35.580		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			36.700	36.700			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
4	Tenaga kesehatan : Dokter				34	34		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			34	34		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			34	34			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			34	34		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			34	34			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
5	Tenaga kesehatan : Bidan				68	68		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			68	68		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			68	68			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			68	68		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			68	68			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
6	Tenaga kesehatan : Perawat				69	69		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			69	69		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			69	69			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			69	69		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			69	69			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
7	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi				14	14		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			14	14		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			14	14			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			14	14		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			14	14			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
8	Tenaga Kesehatan Masyarakat				22	22		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			22	22		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			22	22			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			22	22		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			22	22			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
9	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu				947	947		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			947	947		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			947	947			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			947	947		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			947	947			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	2022	69.278	69.278			Rp13.548.000	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	40.354	40.354			Rp13.751.220	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	40.710	40.710			Rp127.874.345	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	41.064	41.064			Rp257.610.974	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	41.414	41.414			Rp265.339.303	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB		
1	Peloman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)				72	72		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			72	72		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			72	72			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			72	72		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			72	72			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
2	Tensimeter				110	110		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			110	110		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			110	110			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			110	110		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			110	110			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
3	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)				3	3		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			6	6		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			6	6			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			6	6		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			6	6			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
4	Tenaga kesehatan : Dokter				34	34		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			34	34		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			34	34			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			34	34		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			34	34			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
5	Tenaga kesehatan : Bidan				68	68		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			68	68		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			68	68			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			68	68		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			68	68			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
6	Tenaga kesehatan : Perawat				69	69		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			69	69		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			69	69			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			69	69		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			69	69			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
7	Tenaga Kesehatan Masyarakat				22	22		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			22	22		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			22	22			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			22	22		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			22	22			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
8	Obat Hipertensi				69.278	69.278		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			40.354	40.354		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			40.710	40.710			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			41.064	41.064		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			41.414	41.414			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB

Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		2022	7.741	7.741			Rp202.012.000	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	8.071	8.071			Rp205.042.180	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	8.142	8.142			Rp204.598.951	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	8.213	8.213			Rp231.849.877	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	8.283	8.283			Rp238.805.373	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
1	Alat : Glukometer				110	110		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			110	110		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			110	110		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			110	110		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			110	110		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
2	Alat : Strip Tes Gula Darah				7.741	7.741		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			8.071	8.071		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			8.142	8.142		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			8.213	8.213		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			8.283	8.283		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
3	Alat : Kaps Alkoholi				7.741	7.741		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			8.071	8.071		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			8.142	8.142		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			8.213	8.213		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			8.283	8.283		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
4	Alat : Lancet				7.741	7.741		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			8.071	8.071		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			8.142	8.142		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			8.213	8.213		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			8.283	8.283		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
5	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SPTM)				3	3		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			6	6		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			6	6		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			6	6		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			6	6		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
6	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)				72	72		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			72	72		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			72	72		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			72	72		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			72	72		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
7	Tenaga kesehatan : Dokter				34	34		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			34	34		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			34	34		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			34	34		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			34	34		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
8	Tenaga kesehatan : Bidan				68	68		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			68	68		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			68	68		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			68	68		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			68	68		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
9	Tenaga kesehatan : Perawat				69	69		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			69	69		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			69	69		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			69	69		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			69	69		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
10	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi				14	14		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			14	14		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			14	14		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			14	14		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			14	14		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
11	Tenaga Kesehatan Masyarakat				22	22		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			22	22		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			22	22		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			22	22		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			22	22		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
12	Olat Diabetes Melitus				7.741	7.741		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			8.071	8.071		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			8.142	8.142		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			8.213	8.213		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			8.283	8.283		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	2022	339	339			Rp72.735.000	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	340	340			Rp73.826.025	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	343	343			Rp63.937.172	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	346	346			Rp128.805.487	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	349	349			Rp132.669.652	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
1	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (jika sudah tersedia)				6	6		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			6	6		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			6	6		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			6	6		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			6	6		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
2	Kit berisi 2 Alat Fiksasi				6	6		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			6	6		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			6	6		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			6	6		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			6	6		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
3	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan				339	339		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			340	340		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			343	343		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			346	346		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			349	349		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
4	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)				6	6		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			6	6		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			6	6		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			6	6		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			6	6		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
5	Tenaga kesehatan : Dokter				7	7		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			7	7		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			7	7		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			7	7		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			7	7		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
6	Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa				15	15		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			15	15		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			15	15		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			15	15		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			15	15		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
7	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya				2	2		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			2	2		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			2	2		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			2	2		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			2	2		0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB

11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2022	5.076	5.076			Rp64.090.000	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	4.618	4.618			Rp65.051.350	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	5.729	5.729			Rp230.173.820	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	6.394	6.394			Rp257.610.974	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	6.394	6.394			Rp265.339.303	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB				
1	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)			5	5			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			5	5			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			5	5			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			5	5			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			5	5			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
2	Reagen Zn TB			210	210			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			210	210			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			210	210			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			210	210			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			210	210			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
3	Masker jenis rumah tangga dan Masker N95			2	2			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			2	2			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			2	2			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			2	2			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			2	2			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
4	Pot dabak, Kaca slide, Bahan Halus Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spiritus/Banain, Ose/Lidil), Rak pengering			21.014	21.014			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			21.014	21.014			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			21.014	21.014			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			21.014	21.014			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			21.014	21.014			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
5	Cartridge tes cepat molekuler			6.000	6.000			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			6.000	6.000			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			7.000	7.000			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			7.000	7.000			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			7.000	7.000			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
6	Formulir pencatatan dan pelaporan			8	8			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			8	8			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			8	8			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			8	8			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			8	8			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)			7	7			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			7	7			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			7	7			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			7	7			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			7	7			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
8	Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru			36	36			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			36	36			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			36	36			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			36	36			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			36	36			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
9	Tenaga kesehatan : Perawat			47	47			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			47	47			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			47	47			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			47	47			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			47	47			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
10	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)			27	27			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			27	27			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			27	27			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			27	27			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			27	27			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
11	Tenaga kesehatan : Penata Rontgen			11	11			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			11	11			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			11	11			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			11	11			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			11	11			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
12	Tenaga kesehatan masyarakat			3	3			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			3	3			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			3	3			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			3	3			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			3	3			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
13	Tenaga non kesehatan terlatih/mempunyai kualifikasi tertentu			176	176			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			176	176			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			176	176			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			176	176			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			176	176			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
12	Pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Mempengaruhi Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	2022	5.828	5.828			Rp215.404.400	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	5.578	5.578			Rp218.635.466	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	6.051	6.051			Rp204.598.951	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	6.046	6.046			Rp257.610.974	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB	6.036	6.036			Rp265.339.303	0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB				
1	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)			4	4			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			4	4			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			4	4			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			4	4			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			4	4			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
2	Tes cepat HIV (RDT) pertama			8.000	8.000			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			8.000	8.000			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			8.000	8.000			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			8.000	8.000			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			8.000	8.000			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai			15.000	15.000			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			15.000	15.000			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			15.000	15.000			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			15.000	15.000			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			15.000	15.000			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
4	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksanaan, Nomor KTP/NIK			4	4			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			4	4			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			4	4			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			4	4			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			4	4			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
5	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit kulit dan kelamin			118	118			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			118	118			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			118	118			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			118	118			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			118	118			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
6	Tenaga kesehatan : Perawat			75	75			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			75	75			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			75	75			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			75	75			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			75	75			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
7	Tenaga kesehatan : Bidan			80	80			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			80	80			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			80	80			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			80	80			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			80	80			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
8	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)			14	14			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			14	14			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			14	14			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			14	14			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			14	14			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
9	Tenaga kesehatan masyarakat			22	22			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			22	22			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			22	22			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			22	22			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			22	22			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB
10	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu			58	58			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			58	58			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			58	58			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			58	58			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB			58	58			0	APBD	Dinas Kesehatan PPKB

Tabel 3.2.3 Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kota Madiun Tahun 2023-2027

No	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan Dasar	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)											
			Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43				
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehat-hari	2022	38.480	38.480			Rp21.269.000	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan PDAM	39.580	39.580			Rp1.679.768.000	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan PDAM	40.030	40.030			Rp50.000.000	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan PDAM	40.130	40.130			Rp50.000.000	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan PDAM	40.180	40.180			Rp50.000.000	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan PDAM				
1	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)				38.480	38.480	Rp21.269.000	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan PDAM			39.580	39.580			0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan PDAM			40.030	40.030			0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan PDAM			40.130	40.130			0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan PDAM			40.180	40.180			0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan PDAM
2	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbau)				38.480	38.480	Rp21.269.000	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan PDAM			39.580	39.580			0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan PDAM			40.030	40.030			0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan PDAM			40.130	40.130			0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan PDAM			40.130	40.130			0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan PDAM
3	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)							0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan PDAM							0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan PDAM							0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan PDAM													0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan PDAM			
4	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbau)							0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan PDAM							0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan PDAM							0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan PDAM													0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan PDAM			
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	2022	44.706	44.706			Rp6.051.801.600	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	44.756	44.756			Rp17.746.222.000	0	APBD, DAK	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	44.806	44.806			Rp900.000.000	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	44.856	44.856			Rp700.000.000	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	44.906	44.906			Rp500.000.000	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)				44.706	44.706		0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			44.756	44.756			0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			44.806	44.806	Rp900.000.000	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			44.856	44.856	Rp700.000.000	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			44.906	44.906			0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)							0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman													0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
3	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)				44.706	44.706		0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			44.756	44.756			0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			44.806	44.806			0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			44.856	44.856										0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
4	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)							0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman														0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
5	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)							0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman														0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			

Tabel 3.2.5 Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Madiun Tahun 2023-2027

No	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan Dasar	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43				
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (TRANTRIBUM)	2022	1	1			Rp279.281.000	0	AFBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1	1			Rp322.173.200	0	AFBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1	1			Rp352.000.000	0	AFBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1	1			Rp352.000.000	0	AFBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1	1			Rp352.000.000	0	AFBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran				
1	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)				1	1	Rp126.681.000	0	AFBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran				3	3	Rp191.460.000	0	AFBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran				3	3	Rp200.000.000	0	AFBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran				3	3	Rp200.000.000	0	AFBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran				3	3	Rp200.000.000	0	AFBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, T bumtramas, pelaksanaan penanganan uruk rasa dan kebutuhan massa, pelaksanaan pengendalian pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)				1	1	Rp0	0	AFBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran				5	5	Rp0	0	AFBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran				5	5	Rp0	0	AFBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran				5	5	Rp0	0	AFBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran				5	5	Rp0	0	AFBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan Masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SIM)				4	4	Rp150.500.000	0	AFBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran				4	4	Rp128.750.000	0	AFBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran				4	4	Rp150.000.000	0	AFBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran				4	4	Rp150.000.000	0	AFBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran				4	4	Rp150.000.000	0	AFBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantribum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Peraturan (pelayanan layanan materiil dan pelayanan pengabdian)				1	1	Rp0	0	AFBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran				1	1	Rp0	0	AFBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran				1	1	Rp0	0	AFBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran				1	1	Rp0	0	AFBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran				1	1	Rp0	0	AFBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil				1	1	Rp2.100.000	0	AFBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran				1	1	Rp1.963.200	0	AFBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran				1	1	Rp2.000.000	0	AFBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran				1	1	Rp2.000.000	0	AFBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran				1	1	Rp2.000.000	0	AFBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (perbaikan pertama yang terkena cedera fiskus akibat penegakan Perda dan Peraturan dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisk sedang dan/atau berat)				1	1	Rp0	0	AFBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran				1	1	Rp0	0	AFBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran				1	1	Rp0	0	AFBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran				1	1	Rp0	0	AFBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran				1	1	Rp0	0	AFBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (WEBENCANAAN)	2022	950	950			Rp104.686.000	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100	100			Rp38.758.000	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	900	900			Rp182.535.000	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	900	900			Rp182.535.000	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	Pemetaan terhadap lokasi daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRIB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)				1	1	Rp0	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			1	1	Rp0	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			1	1	Rp0	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			1	1	Rp0	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana				989	989	Rp0	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			989	989	Rp0	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			989	989	Rp0	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			989	989	Rp0	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Mebukukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)				950	950	Rp104.686.000	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			100	100	Rp29.216.000	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			900	900	Rp158.475.000	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			900	900	Rp158.475.000	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Penyediaan dan pemasangan rambu evaluasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana				52	52	Rp0	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			52	52	Rp0	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			52	52	Rp0	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			52	52	Rp0	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (WEBENCANAAN)	2022	252	252			Rp85.633.000	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	180	180			Rp119.148.000	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	538	538			Rp156.759.000	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	608	608			Rp156.759.000	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi ... dll)				93	93	Rp0	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			93	93	Rp0	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			93	93	Rp0	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			93	93	Rp0	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	Peningkatan kapasitas personal Sumber Daya Manusia (SDM) (terlewatnya aparatur yang merangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)				252	252	Rp85.633.000	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			180	180	Rp119.148.000	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			538	538	Rp156.759.000	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			608	608	Rp156.759.000	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	2022	12	18		Rp60.475.000	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18	18		Rp62.650.000	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18	18		Rp58.137.000	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18	18		Rp58.137.000	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
1	Aktivasi sistem komando penanganam darurat bencana (terleaksarnya koordinasi sistem komando oleh pusaboks penanggulangan bencana dalam penyediaan petugas penanganam darurat bencana)				1	1	Rp0	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			1	1	Rp0	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			1	1	Rp0	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			1	1	Rp0	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	Pendataan terhadap warga yang terlewat menjadi korban bencana				12	18	Rp0	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			18	18	Rp0	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			18	18	Rp0	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			18	18	Rp0	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Mebukukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)				1	1	Rp0	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			1	1	Rp0	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			1	1	Rp0	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			1	1	Rp0	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Respon Cepat Kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (termespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)				1	1	Rp0	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			1	1	Rp0	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			1	1	Rp0	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			1	1	Rp0	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Pelaksanaan pencarian, kebutuhan evakuasi korban bencana				12	18	Rp60.475.000	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			18	18	Rp62.650.000	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			18	18	Rp58.137.000	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			18	18	Rp58.137.000	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	2022	45	45			Rp1.055.505.836	0	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	45	45			Rp913.276.000	0	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	40	40			Rp913.276.000	0	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	40	40			Rp913.276.000	0	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok rebahan pemadam kebakaran/redkar)				15	15	Rp365.527.000	0	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			15	15	Rp300.228.000	0	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			15	15	Rp300.228.000	0	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			15	15	Rp300.228.000	0	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)				3	3	Rp0	0	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			3	3	Rp0	0	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			3	3	Rp0	0	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			3	3	Rp0	0	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
3	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh - mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll), penyelamatan dan evakuasi (helm pelugas Penyelamatan, jaket, ... dll)				10	10	Rp324.451.836	0	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			7	7	Rp312.820.000	0	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			7	7	Rp312.820.000	0	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			7	7	Rp312.820.000	0	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
4	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah personel SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)				30	30	Rp0	0	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			2	2	Rp0	0	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			2	2	Rp0	0	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			2	2	Rp0	0	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
5	Pelatihan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)				1	1	Rp365.527.000	0	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			1	1	Rp300.228.000	0	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			1	1	Rp300.228.000	0	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			1	1	Rp300.228.000	0	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
6	Pelatihan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, kehilangan nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)				1	1	Rp0	0	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			1	1	Rp0	0	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			1	1	Rp0	0	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			1	1	Rp0	0	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Tabel 3.2.6 Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Sosial di Kota Madiun Tahun 2023-2027

No	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan Dasar	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)													
			Perencana Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Perencana Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Perencana Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Perencana Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Perencana Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Perencana Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45				
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	2022	97	97			Rp2.584.571.701	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100	100			Rp2.644.767.490	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	450	450			Rp2.738.078.756	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	460	460			Rp3.003.231.727	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	470	470			Rp3.153.393.313	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
1	Jayanan data dan pengaduan	1			97	97	Rp0	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					Rp0	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					Rp0	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					Rp0	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					Rp0	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
2	Penyediaan layanan kesehatan / layanan nakesi cepat	1			1	1	Rp248.777.000	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			1	1	Rp18.219.900	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					1	1	Rp132.524.508	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					1	1	Rp33.478.684	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					1	1	Rp40.152.619	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Penyediaan pemukiman	95			97	97	Rp204.084.000	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			100	100	Rp170.896.000	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					450	450	Rp191.574.416	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					460	460	Rp195.456.209	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					470	470	Rp205.229.019	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	Penyediaan sandang	56			5	5	Rp25.768.681	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			5	5	Rp15.332.431	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					1	1	Rp17.187.655	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					1	1	Rp17.311.406	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					1	1	Rp18.176.977	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Penyediaan alat bantu	15			7	7	Rp35.457.200	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			7	7	Rp26.308.000	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					1	1	Rp29.491.268	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					1	1	Rp29.703.605	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					1	1	Rp31.188.785	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6	Penyediaan perbaikan kesehatan (Penyehatan PSK)	95			1	1	Rp0	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			1	1	Rp0	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					1	1	Rp0	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					1	1	Rp0	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					1	1	Rp0	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Pertolongan bimbiting fisik, mental, spiritual dan sosial	95			97	97	Rp10.100.000	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			100	100	Rp6.500.000	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					110	110	Rp10.649.500	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					120	120	Rp195.456.209	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					130	130	Rp205.229.019	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Pertolongan bimbiting sosial kepada keluarga penyandang disabilitas berat	56			5	5	Rp1.900.292.820	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			5	5	Rp1.160.391.159	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					1	1	Rp2.195.092.889	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					1	1	Rp2.210.897.558	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					1	3	Rp3.321.442.436	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak / Buku dokumen kependudukan	0			1	1	Rp0	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			1	1	Rp0	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					1	1	Rp0	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					1	1	Rp0	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					1	1	Rp0	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10	Monev ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	0			97	97	Rp117.792.000	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			100	100	Rp121.560.000	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					110	110	Rp136.268.760	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					120	120	Rp195.456.209	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					130	130	Rp205.229.019	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11	Pertemuan pelayanan penekanan keluarga	56			5	5	Rp0	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			5	5	Rp0	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					1	1	Rp0	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					1	1	Rp0	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					1	1	Rp0	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12	Pertemuan pelayanan reunifikasi keluarga	53			5	5	Rp2.300.000	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			5	5	Rp22.560.000	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					1	1	Rp25.289.760	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					1	1	Rp25.471.846	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					1	1	Rp26.745.439	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13	Jayanan ngkaji	0			2	2	Rp0	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			2	2	Rp0	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					1	1	Rp0	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					1	1	Rp0	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					1	1	Rp0	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	2022	465	465			Rp2.549.114.501	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	470	470			Rp2.626.918.980	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	80	80			Rp2.708.587.488	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	90	90			Rp2.730.591.775	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100	100			Rp2.867.121.264	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
1	Jayanan data dan pengaduan	1			1	1	Rp0	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			1	1	Rp2.618.459.490	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					1	1	Rp0	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					1	1	Rp0	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					1	1	Rp0	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Penyediaan layanan kesehatan / layanan nakesi cepat	0			1	1	Rp248.777.000	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			1	1	Rp18.219.900	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					1	1	Rp132.524.508	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					1	1	Rp33.478.684	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					1	1	Rp40.152.619	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Penyediaan pemukiman	460			465	465	Rp204.084.000	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			470	470	Rp170.896.000	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					80	80	Rp191.574.416	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					90	90	Rp195.456.209	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					100	100	Rp205.229.019	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	Penyediaan sandang	4			5	5	Rp25.768.681	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			5	5	Rp15.332.431	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					6	6	Rp17.187.655	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					6	6	Rp17.311.406	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					7	7	Rp18.176.977	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Pertemuan bimbiting fisik, mental, spiritual dan sosial	4			5	5	Rp10.100.000	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			5	5	Rp6.500.000	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					6	6	Rp10.649.500	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					6	6	Rp10.726.176	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					7	7	Rp11.262.485	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6	Penyediaan perbaikan kesehatan (Penyehatan PSK)	4			1	1	Rp0	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			1	1	Rp0	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					1	1	Rp0	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					1	1	Rp0	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					1	1	Rp0	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Pertolongan bimbiting sosial kepada keluarga anak telantar	100			5	5	Rp1.900.292.820	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			5	5	Rp1.160.391.159	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					6	6	Rp2.195.092.889	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					6	6	Rp2.210.897.558	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					7	7	Rp3.321.442.436	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak / Buku dokumen kependudukan	0			1	1	Rp0	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			1	1	Rp0	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					1	1	Rp0	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					1	1	Rp0	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					1	1	Rp0	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Monev ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	0			5	5	Rp117.792.000	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			5	5	Rp121.560.000	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					6	6	Rp136.268.760	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					6	6	Rp137.249.895	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					7	7	Rp141.112.390	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10	Pertemuan pelayanan penekanan keluarga	5			5	5	Rp0	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			5	5	Rp0	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					6	6	Rp0	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					6	6	Rp0	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					7	7	Rp0	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11	Pertemuan pelayanan reunifikasi keluarga	5			5	5	Rp2.300.000	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			5	5	Rp22.560.000	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					6	6	Rp25.289.760	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					6	6	Rp25.471.846	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					7	7	Rp26.745.439	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12	Jayanan ngkaji	0			1	1	Rp0	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			1	1	Rp0	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					2	2	Rp0	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					2	2	Rp0	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					2	2	Rp0	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggapi dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana (Kabupaten/Kota)	2022	36	36			Rp78.209.900	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	36	36			Rp64.887.330	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9	9			Rp72.738.697	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9	9			Rp78.262.416	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9	9			Rp76.925.536	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
1	Penyediaan pemakaran	17			36	36	Rp0.282.600	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			36	36	Rp0.943.665	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			9	9			Rp0.324.848	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			9	9			Rp0.550.387	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			9	9			Rp0.127.907	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Penyediaan sandang	17			36	36	Rp0.177.300	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			36	36	Rp0.943.665	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			9	9			Rp0.324.848	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			9	9			Rp0.550.387	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			9	9			Rp0.127.907	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi				1	1	Rp0	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			1	1	Rp0	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			1	1			Rp0	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			1	1			Rp0	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			1	1			Rp0	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	Perawatan khusus bagi kelompok rentan	17					Rp0	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					Rp0	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							Rp0	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							Rp0	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					Rp0	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
5	Pelayanan dukungan Psikososial	17					Rp0.730.000	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			5	5	Rp0.000.000	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			3	3			Rp0.089.000	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			3	3			Rp0.161.641	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			3	3			Rp0.669.723	0	APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 18 mengamanatkan bahwa Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam Undang-Undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar memperhatikan target yang ada dalam SPM menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, Rencana strategis Perangkat Daerah sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA PD dan RKA PD. Sistematis ini dimaksud antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek/tahunan. Untuk itu, Rencana Aksi Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga Rencana Aksi Penerapan SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dalam proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a) Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah.
 - b) Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c) Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.

- d) Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e) Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f) Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a) Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b) Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c) Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
 - d) Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e) Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a) Gambaran layanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b) Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c) Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

- d) Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e) Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f) Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a) Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b) Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c) Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
6. Integrasi Rencana Aksi Penerapan SPM ke dalam Penganggaran Daerah Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA) dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrument rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:
- a) Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
 - b) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA PD sebelum disepakati dengan DPRD.

- c) Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM

A. PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPM

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan Layanan dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada waktu perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya. Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. **Perencanaan**, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.

2. **Pelaksanaan Kegiatan**, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
3. Penggunaan **Sumber Daya**, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.
4. **Penyampaian Perkembangan Hasil**, pemantuan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.
5. Pelaku Kegiatan, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:

1. Ketaatan/*compliance*, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Pemeriksaan/*auditing*, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
3. Laporan/*accounting*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.

4. Penjelasan/*explanation*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kota Madiun, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di *crosscheck* apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

1. **Kebijakan Daerah.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:
 - a) Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
 - b) Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
 - c) Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
 - d) Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
 - 1) Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?

- 2) Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
 - 3) Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar diberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
 - 4) Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?
2. **Koordinasi.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:
- a) Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
 - b) Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
 - c) Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 - d) Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 - e) Bagaimana hubungan Pemerintah Daerah dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? Apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
3. **Manajemen Kerja.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:
- a) Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

- b) Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?
 - c) Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?
4. **Pendanaan.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:
- a) Apakah Pemerintah Daerah memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
 - b) Bagaimana Pemerintah Daerah menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? Apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
 - c) Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara paripabel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannya? Sebaliknya, atukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? Perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
 - d) Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
 - e) Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?
 - f) Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang dimanfaatkan, serta berimbang pada berapa banyak warga yang terlayani?
 - g) Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga nonpemerintah,

berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

Tabel 4.1 Evaluasi Pencapaian Indikator SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, *stakeholder* terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

B. PELAPORAN PELAKSANAAN RENAKSI PENERAPAN SPM

Sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2023 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa gubernur, bupati/wali kota menyampaikan laporan penerapan SPM melalui aplikasi pada laman <https://spm.bangda.kemendagri.go.id> setiap triwulan.

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan yang dihadapi dalam usaha pemenuhan SPM.

1. **Indeks Pencapaian SPM.** Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 - a) Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;
 - b) Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan; dan
 - c) SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
2. **Anggaran SPM.** Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 - a) Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?
 - b) Bagaimana SPM diposisikan?
 - c) Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM?
 - d) Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan, terutama dalam mencapai target *output* pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?
 - e) Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?
3. **Permasalahan SPM.** Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 - a) Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
 - b) Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM?
 - c) Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut?

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Capaian Penerapan SPM pada tiap bidang urusan wajib pelayanan dasar pada SPM di lingkungan Pemerintah Kota Madiun secara mayoritas sudah baik. Akan tetapi masih ada beberapa indikator yang belum maksimal pencapaiannya. Oleh karena itu dengan disusunnya Rencana aksi penerapan SPM dapat menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, yang memuat program, kegiatan dan subkegiatan, penerima dan mutu layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SPM selama 5 tahun ke depan. Sehingga kedepannya diharapkan semua indikator dapat tercapai dan seluruh masyarakat dapat menerima pelayanan minimal dasar tanpa kecuali.

B. SARAN

Guna mencapai penerapan SPM yang maksimal, disarankan sebagai berikut:

1. Perlu penegasan terkait tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah pengampu SPM sehingga setiap indikator pelayanan minimal jelas siapa yang bertanggungjawab terhadap pemenuhan pelayanan dasarnya.
2. Melaksanakan pemutakhiran data secara berkala sesuai dengan tahapan penerapan SPM.
3. Menambah fasilitas yang diperlukan untuk pemenuhan pelayanan dasar, terutama fasilitas yang ramah bagi para penyandang disabilitas.
4. Perlu penguatan bagi Tim Penerapan SPM Kota Madiun berkaitan dengan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana peraturan yang berlaku.
5. Segera mengoordinasikan rencana aksi daerah guna pemenuhan SPM dan memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan penganggaran.
6. Menggiatkan komunikasi dan koordinasi antara pengampu SPM di Kota Madiun dengan Sekretariat Pusat di Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri guna mendiskusikan masalah dan mencari solusi terbaik penanganannya.

Demikian Rencana Aksi Penerapan SPM ini dibuat, dengan harapan dapat bermanfaat untuk proses percepatan penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan minimal dasar bagi masyarakat di wilayah Pemerintah Kota Madiun.

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009